

PETA PENCALONAN PEREMPUAN DI PEMILU 2019

MPI, KPP-RI, KPPI, & PERLUDEM

KONTEKS

- The political of presence dan the political of ideas menjadi kunci utama pentingnya perempuan hadir di lembaga legislatif
- Partai politik secara aktual menjadi *gatekeepers* untuk memilih kandidat termasuk mengantarkan perempuan untuk mengisi kursi-kursi jabatan publik.
- Trend keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu dari 9% pada Pemilu 1999 menjadi 12% pada Pemilu 2004 dan naik menjadi 18% pada Pemilu 2009, akan tetapi stagnan pada Pemilu 2014 turun 18%.
- Disain regulasi mengenai kebijakan afirmasi kuota 30% pencalonan perempuan dalam daftar calon sama sekali tidak berubah dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

BAGAIMANA PETA PENCALONAN PEREMPUAN DI PEMILU 2019?



PERBANDINGAN JUMLAH CALON ANGGOTA DPR PEREMPUAN DI PEMILU 2009 & 2014

Partai Politik	Caleg DPR Pemilu 2009				Jumlah	Caleg DPR Pemilu 2014				Jumlah
	Laki-Laki	%	Perempuan	%		Laki-Laki	%	Perempuan	%	
PDIP	405	64.59	222	35.41	627	360	64.29	200	35.71	560
Golkar	447	69.73	194	30.27	641	358	63.93	202	36.07	560
Gerindra	280	70.71	116	29.29	396	354	63.55	203	36.45	557
Demokrat	450	67.06	221	32.94	671	355	63.39	205	36.61	560
PAN	419	70.30	177	29.70	596	353	63.04	207	36.96	560
PKB	264	66.33	134	33.67	398	348	62.37	210	37.63	558
PKS	367	63.39	212	36.61	579	301	61.18	191	38.82	492
PPP	354	73.60	127	26.40	481	334	60.95	214	39.05	548
Nasdem	-	-	-	-	-	333	59.57	226	40.43	559
Hanura	419	69.26	186	30.74	605	355	63.62	203	36.38	558

Sumber: diolah dari Cetro 2009 dan Puskapol UI Samosir, Heru dkk 2015: hlm. 13-14

KETERPILIHAN CALEG DI 2014

Nomor Urut	Pemilu 2009 (%)	Pemilu 2014 (%)
Nomor Urut 1	64.96	62.14
Nomor Urut 2	19.34	16.96
Nomor Urut 3	6.39	4.46
Nomor Urut 4	4.38	4.64
Nomor Urut 5	1.46	3.75
Nomor Urut 6 dst	3.47	6.96

Sumber: Puskapol UI Samosir, Heru dkk 2015: hlm. 15

Partai Politik	Kursi Perempuan di DPR	Anggota DPR Perempuan Incumbent	Anggota DPR Perempuan Baru
PDIP	21	13	8
Golkar	16	3	13
Gerindra	12	2	10
Demokrat	13	5	8
PAN	9	3	6
PKB	10	4	6
PKS	1	1	0
PPP	10	5	5
Nasdem	4	0	4
Hanura	2	1	1
Jumlah	98	37	61

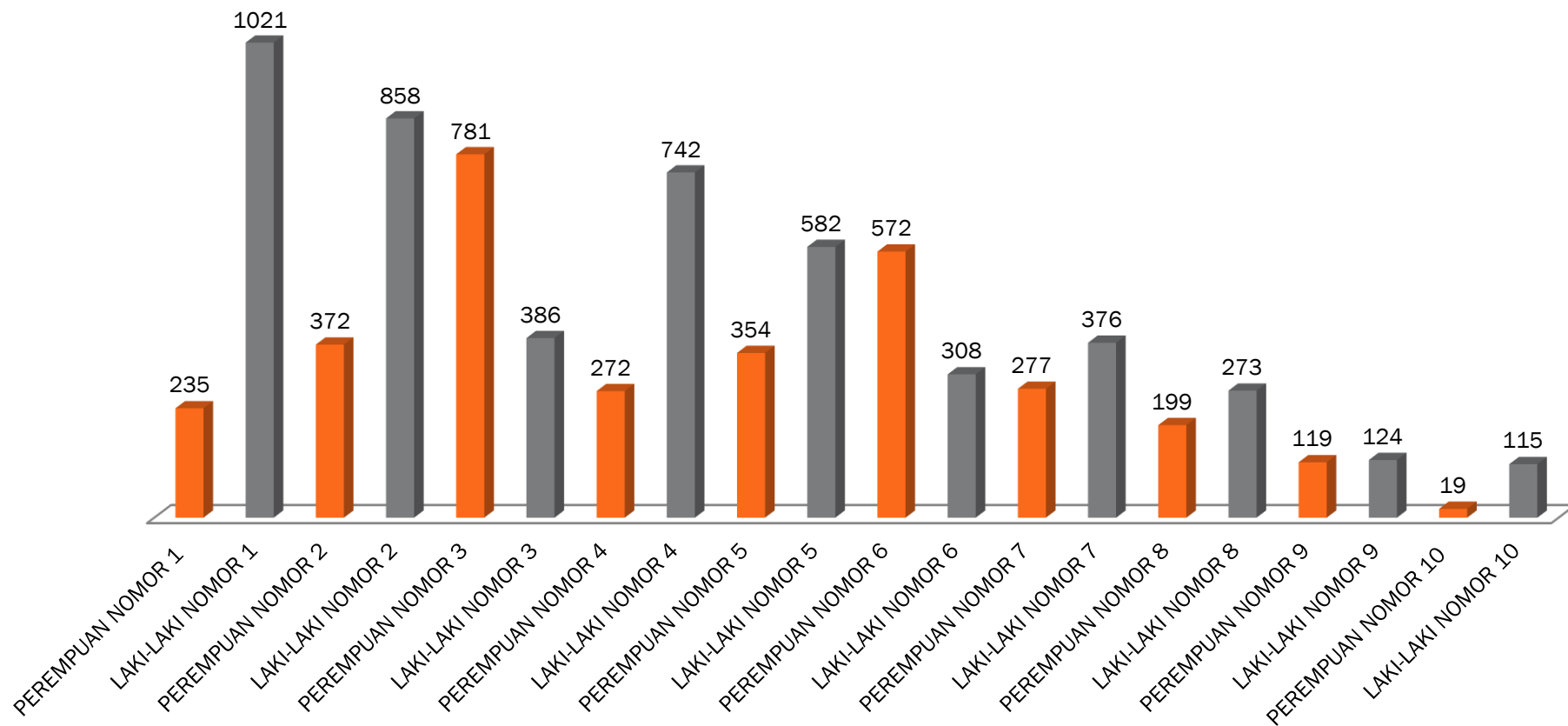
Sumber: diolah dari data Puskapol UI Samosir, Heru dkk 2015: hlm. 71-97

TOTAL PENCALONAN DCT PARTAI POLITIK DI PEMILU DPR RI 2019

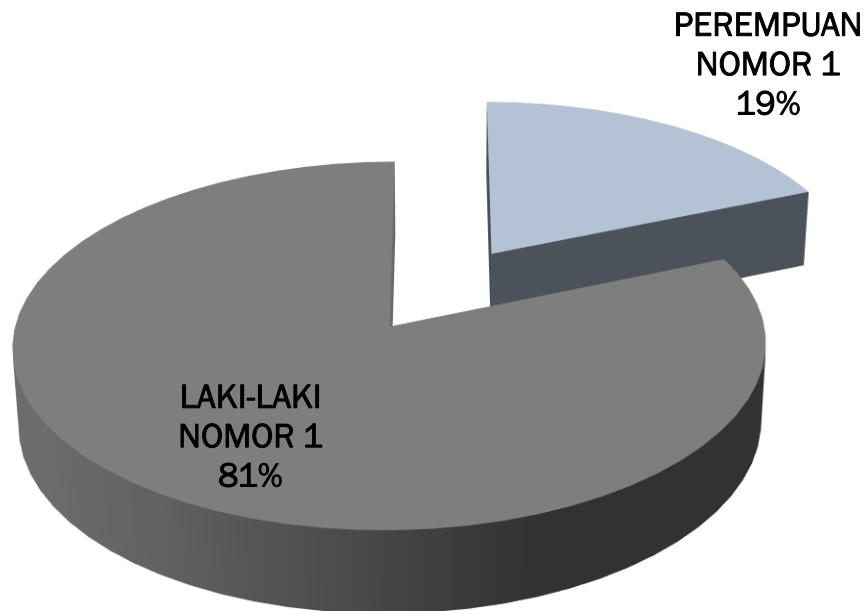
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	TOTAL
1	PKB	220	355	575
2	GERINDRA	209	360	569
3	PDIP	215	358	573
4	GOLKAR	217	357	574
5	NASDEM	221	354	575
6	GARUDA	110	115	225
7	BERKARYA	213	341	554
8	PKS	212	321	533
9	PERINDO	221	347	568
10	PPP	233	321	554
11	PSI	274	300	574
12	PAN	219	356	575
13	HANURA	177	250	427
14	DEMOKRAT	223	350	573
19	PBB	160	239	399
20	PKPI	76	61	137
TOTAL		3200	4785	7985

Disclaimer: Pengolahan data ini bersumber dari data DCT yang dipublikasi oleh KPU di <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/950> pengolahan data dilakukan sejak tanggal 21 sampai 23 September 2019. Terdapat temuan yang berbeda dari total DCT untuk partai PBB antara yang dipublikasi oleh KPU pada tanggal 20 September 2019 yang bertajuk Siaran Pers: Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, dan Pasangan Capres Cawapres Tahun 2019, dengan total DCT untuk PBB sebanyak 382. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dengan melihat DCT setiap partai (termasuk PBB) di 80 dapil satu persatu yang sumber datanya diunduh dari KPU, jumlah DCT untuk PBB sebanyak 399. Sehingga terdapat selisih sebanyak 17.

SEBARAN NOMOR URUT DCT PEMILU 2019

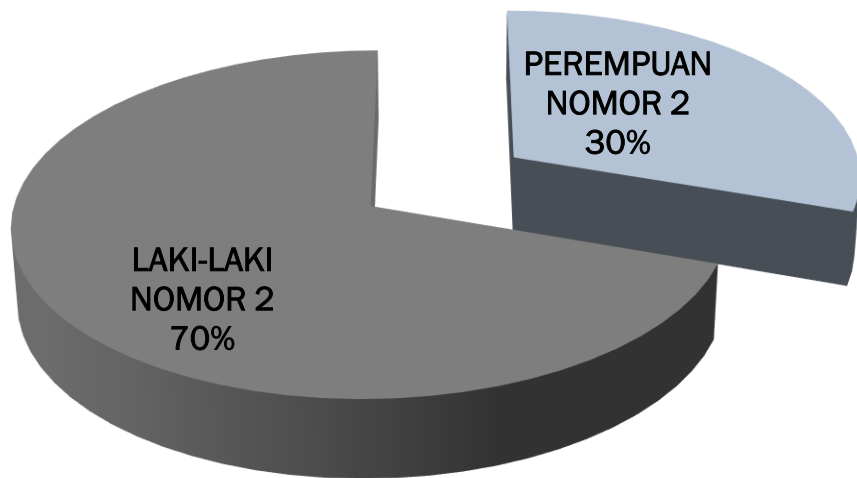


DCT NOMOR URUT 1



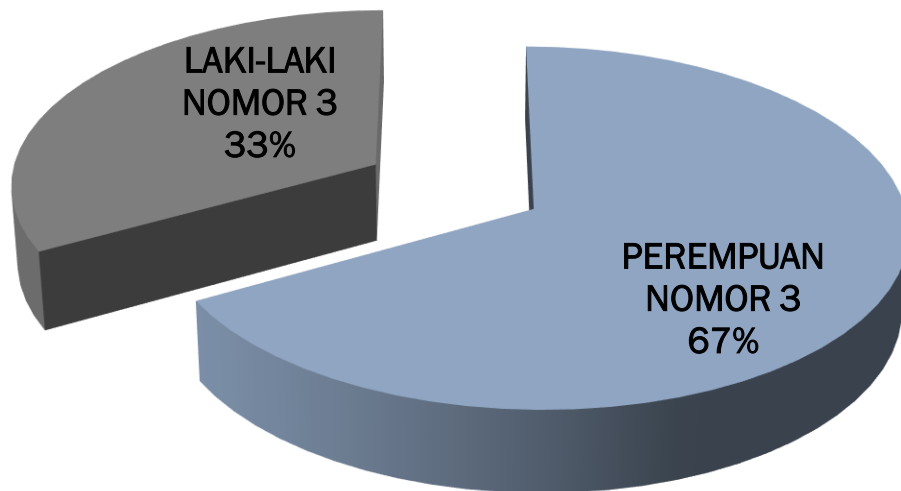
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 1	LAKI-LAKI NOMOR 1
1	PKB	15	65
2	GERINDRA	14	65
3	PDIP	13	67
4	GOLKAR	12	68
5	NASDEM	19	61
6	GARUDA	14	63
7	BERKARYA	20	60
8	PKS	6	74
9	PERINDO	16	64
10	PPP	15	65
11	PSI	17	63
12	PAN	14	66
13	HANURA	12	67
14	DEMOKRAT	18	62
19	PBB	4	76
20	PKPI	26	35
	TOTAL	235	1021

DCT NOMOR URUT 2



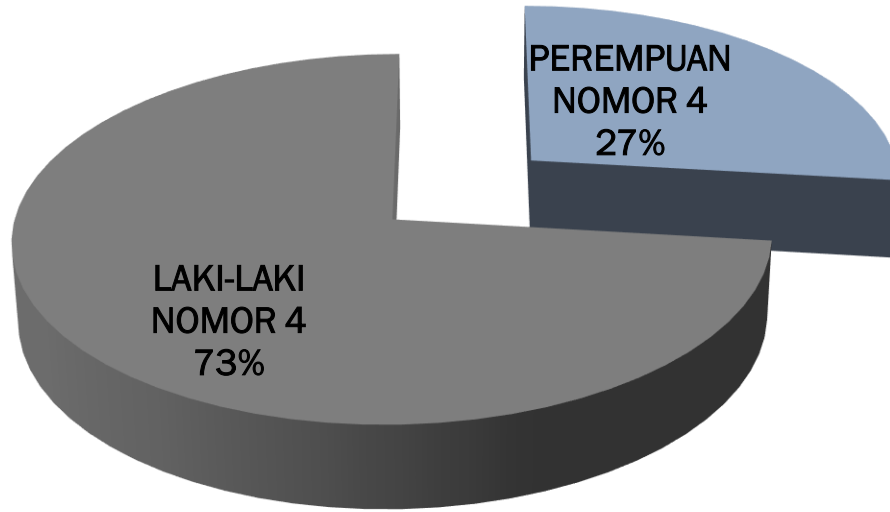
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 2	LAKI-LAKI NOMOR 2
1	PKB	12	68
2	GERINDRA	14	65
3	PDIP	23	57
4	GOLKAR	27	53
5	NASDEM	23	57
6	GARUDA	47	27
7	BERKARYA	14	66
8	PKS	25	55
9	PERINDO	17	63
10	PPP	20	60
11	PSI	31	49
12	PAN	21	59
13	HANURA	20	59
14	DEMOKRAT	22	58
19	PBB	31	47
20	PKPI	25	15
TOTAL		372	858

DCT NOMOR URUT 3



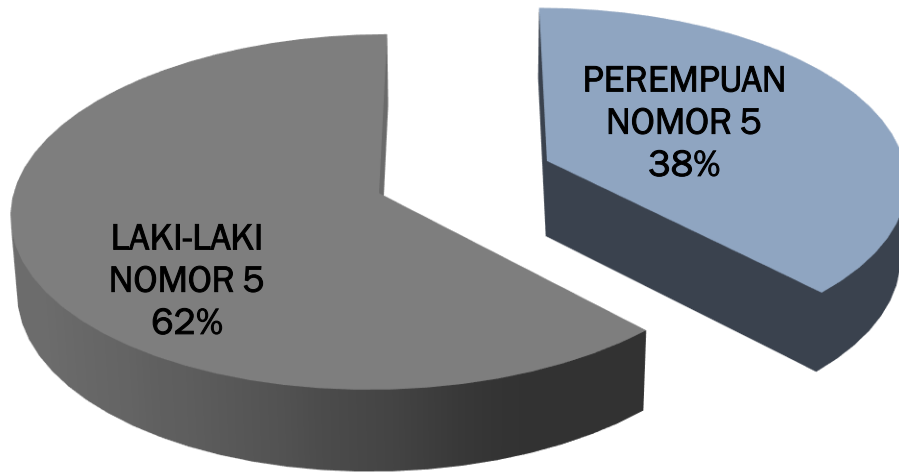
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 3	LAKI-LAKI NOMOR 3
1	PKB	57	23
2	GERINDRA	54	25
3	PDIP	49	31
4	GOLKAR	52	28
5	NASDEM	52	28
6	GARUDA	29	15
7	BERKARYA	57	23
8	PKS	53	25
9	PERINDO	51	28
10	PPP	55	25
11	PSI	51	29
12	PAN	50	30
13	HANURA	58	18
14	DEMOKRAT	47	33
19	PBB	51	18
20	PKPI	15	7
	TOTAL	781	386

DCT NOMOR URUT 4



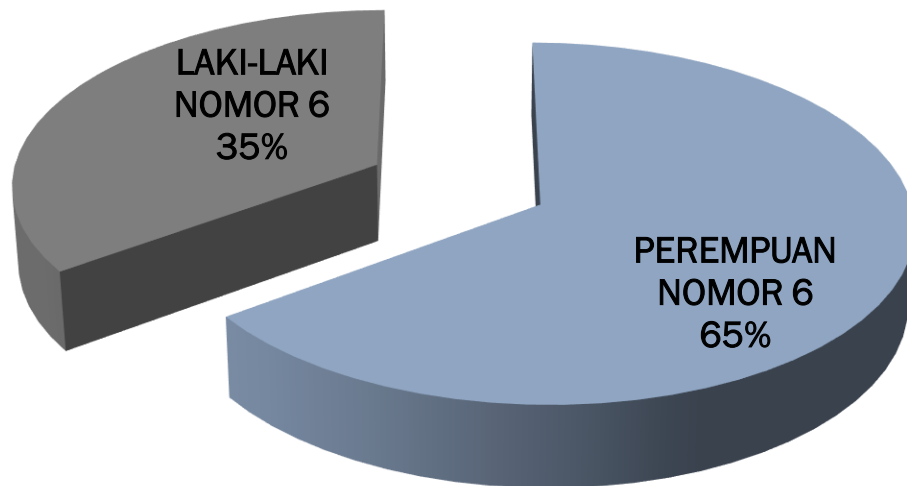
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 4	LAKI-LAKI NOMOR 4
1	PKB	17	57
2	GERINDRA	17	56
3	PDIP	9	65
4	GOLKAR	19	55
5	NASDEM	22	52
6	GARUDA	12	6
7	BERKARYA	19	52
8	PKS	17	54
9	PERINDO	23	51
10	PPP	17	56
11	PSI	29	45
12	PAN	19	55
13	HANURA	19	38
14	DEMOKRAT	16	58
19	PBB	10	40
20	PKPI	7	2
	TOTAL	272	742

DCT NOMOR URUT 5



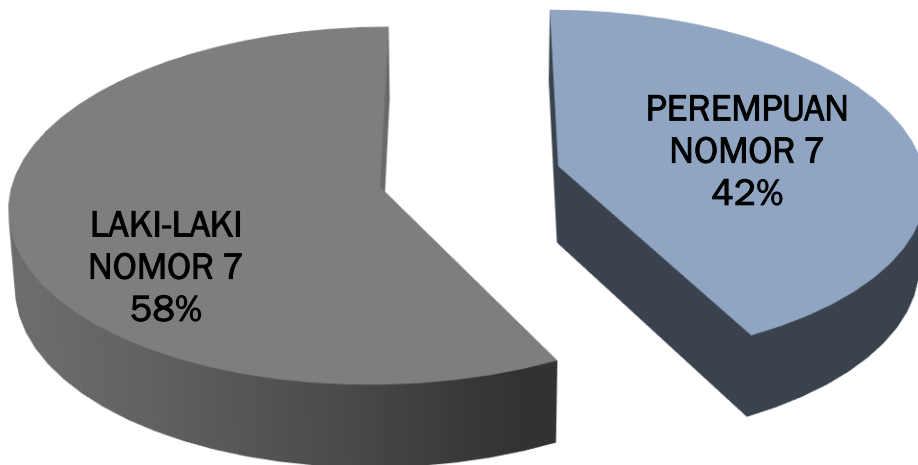
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 5	LAKI-LAKI NOMOR 5
1	PKB	21	48
2	GERINDRA	28	40
3	PDIP	15	54
4	GOLKAR	18	51
5	NASDEM	19	50
6	GARUDA	5	3
7	BERKARYA	23	45
8	PKS	37	28
9	PERINDO	24	45
10	PPP	35	34
11	PSI	37	32
12	PAN	23	46
13	HANURA	28	26
14	DEMOKRAT	22	47
19	PBB	16	31
20	PKPI	3	2
TOTAL		354	582

DCT NOMOR URUT 6



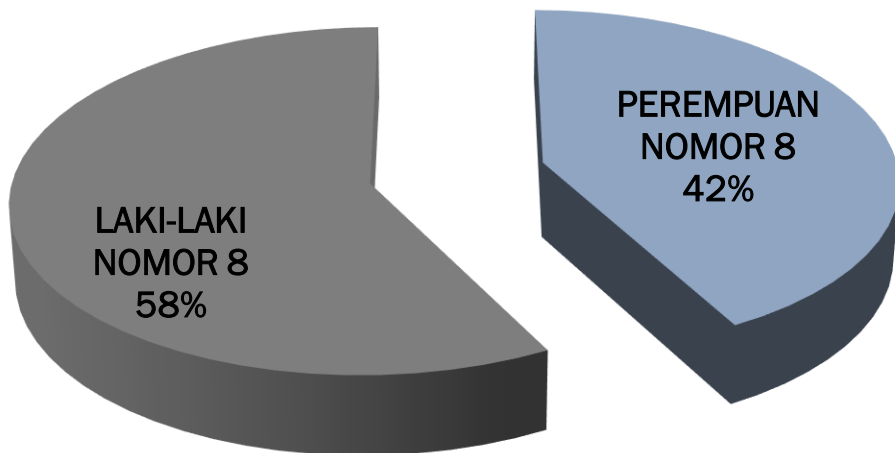
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 6	LAKI-LAKI NOMOR 6
1	PKB	46	22
2	GERINDRA	42	25
3	PDIP	54	14
4	GOLKAR	47	20
5	NASDEM	41	27
6	GARUDA	2	
7	BERKARYA	39	29
8	PKS	31	30
9	PERINDO	38	29
10	PPP	44	21
11	PSI	46	22
12	PAN	42	26
13	HANURA	23	19
14	DEMOKRAT	50	17
19	PBB	27	7
20	PKPI		
TOTAL		572	308

DCT NOMOR URUT 7



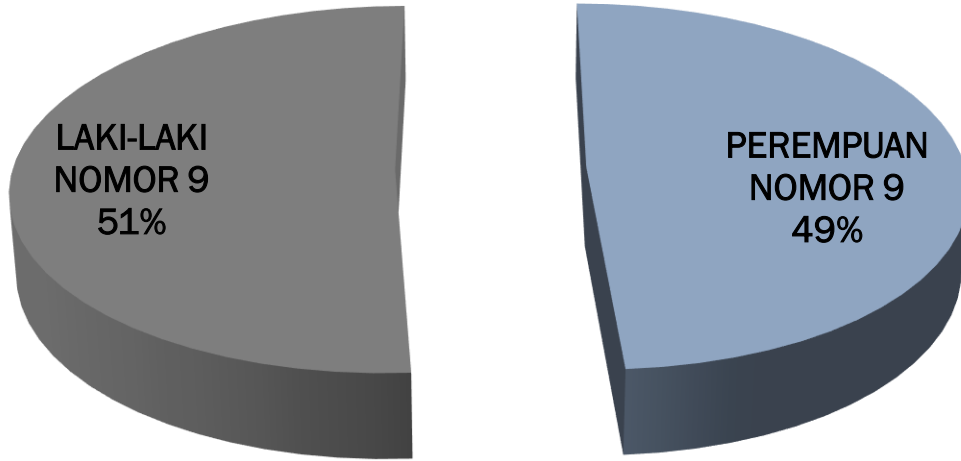
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 7	LAKI-LAKI NOMOR 7
1	PKB	20	33
2	GERINDRA	22	31
3	PDIP	20	32
4	GOLKAR	10	43
5	NASDEM	24	29
6	GARUDA	1	
7	BERKARYA	17	30
8	PKS	27	19
9	PERINDO	26	26
10	PPP	22	25
11	PSI	29	24
12	PAN	21	32
13	HANURA	6	10
14	DEMOKRAT	23	30
19	PBB	9	12
20	PKPI		
TOTAL		277	376

DCT NOMOR URUT 8



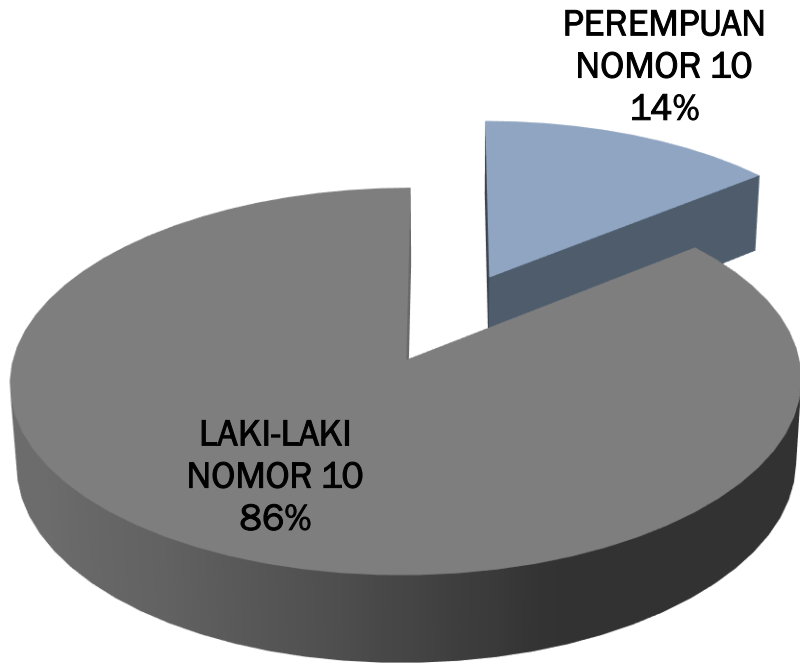
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 8	LAKI-LAKI NOMOR 8
1	PKB	18	21
2	GERINDRA	9	30
3	PDIP	20	18
4	GOLKAR	20	19
5	NASDEM	10	29
6	GARUDA		1
7	BERKARYA	14	18
8	PKS	7	25
9	PERINDO	20	17
10	PPP	15	16
11	PSI	20	19
12	PAN	16	23
13	HANURA	8	5
14	DEMOKRAT	13	26
19	PBB	9	6
20	PKPI		
	TOTAL	199	273

DCT NOMOR URUT 9



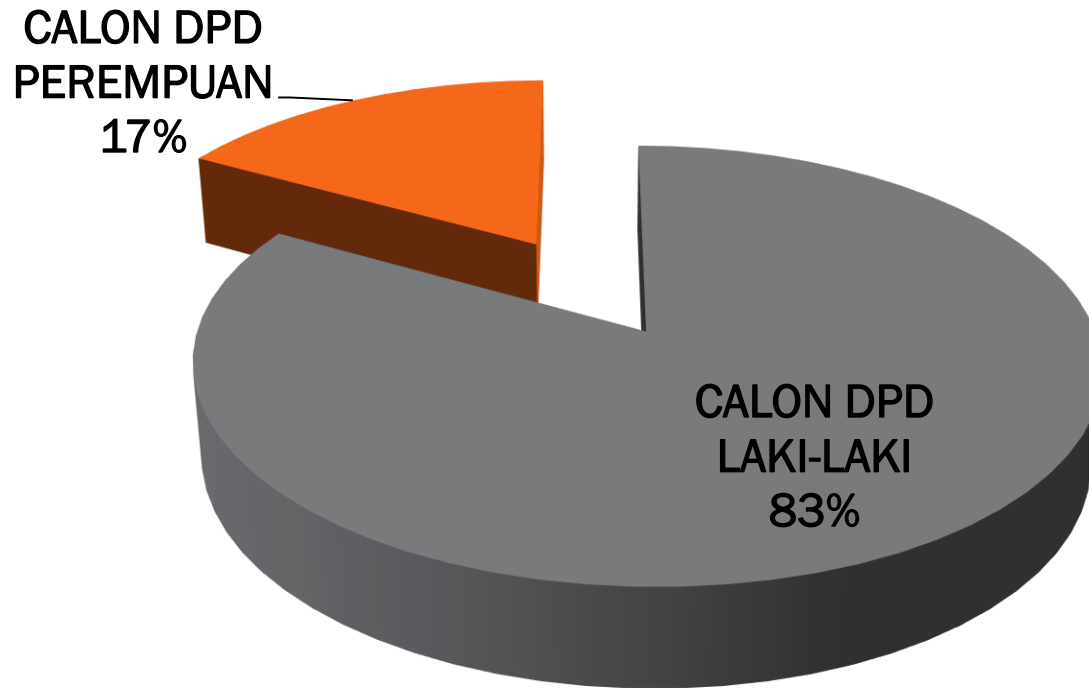
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 9	LAKI-LAKI NOMOR 9
1	PKB	11	9
2	GERINDRA	9	11
3	PDIP	11	9
4	GOLKAR	11	9
5	NASDEM	10	10
6	GARUDA		
7	BERKARYA	8	11
8	PKS	8	7
9	PERINDO	6	13
10	PPP	8	11
11	PSI	10	10
12	PAN	12	8
13	HANURA	3	4
14	DEMOKRAT		
19	PBB	2	2
20	PKPI		
	TOTAL	119	124

DCT NOMOR URUT 10



NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEREMPUAN NOMOR 10	LAKI-LAKI NOMOR 10
1	PKB	3	9
2	GERINDRA		12
3	PDIP	1	11
4	GOLKAR	1	11
5	NASDEM	1	11
6	GARUDA		
7	BERKARYA	2	7
8	PKS	1	4
9	PERINDO		11
10	PPP	2	8
11	PSI	4	7
12	PAN	1	11
13	HANURA		4
14	DEMOKRAT	2	9
19	PBB	1	
20	PKPI		
TOTAL		19	115

PETA PENCALONAN DPD



CALON DPD LAKI-LAKI	671
CALON DPD PEREMPUAN	136
TOTAL CALON	807

PETA PENCALONAN DPD

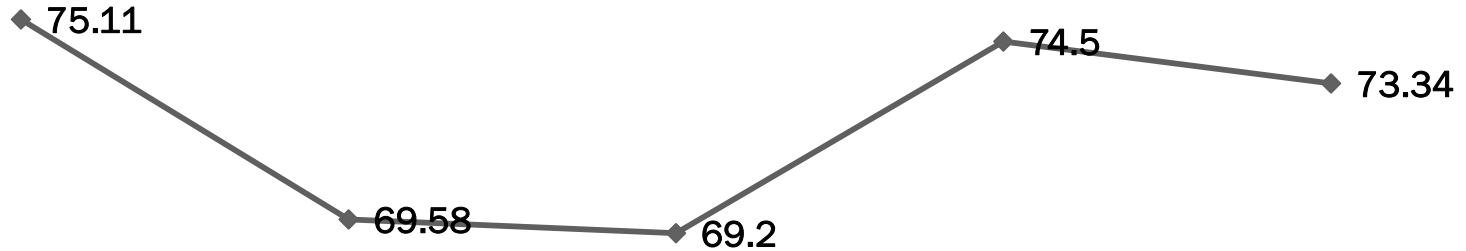
NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH CALON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	% LAKI-LAKI	% PEREMPUAN
1	ACEH	26	25	1	96.2	3.8
2	SUMATERA UTARA	18	16	2	88.9	11.1
3	SUMATERA BARAT	23	21	2	91.3	8.7
4	RIAU	27	24	3	88.9	11.1
5	JAMBI	21	16	5	76.2	23.8
6	SUMATERA SELATAN	33	19	14	57.6	42.4
7	BENGGULU	11	8	3	72.7	27.3
8	LAMPUNG	25	20	5	80.0	20.0
9	KEP. BANGKA BELITUNG	14	12	2	85.7	14.3
10	KEP. RIAU	12	12	0	100.0	0.0
11	DKI JAKARTA	26	19	7	73.1	26.9
12	JAWA BARAT	49	44	5	89.8	10.2
13	JAWA TENGAH	20	17	3	85.0	15.0
14	DI YOGYAKARTA	11	10	1	90.9	9.1
15	JAWA TIMUR	28	25	3	89.3	10.7
16	BANTEN	26	22	4	84.6	15.4
17	BALI	22	19	3	86.4	13.6
18	NUSA TENGGARA BARAT	27	22	5	81.5	18.5
19	NUSA TENGGARA TIMUR	36	30	6	83.3	16.7
20	KALIMANTAN BARAT	20	15	5	75.0	25.0
21	KALIMANTAN TENGAH	20	14	6	70.0	30.0
22	KALIMANTAN SELATAN	14	12	2	85.7	14.3
23	KALIMANTAN TIMUR	27	22	5	81.5	18.5
24	KALIMANTAN UTARA	23	21	2	91.3	8.7
25	SULAWESI UTARA	23	15	8	65.2	34.8
26	SULAWESI TENGAH	21	21	0	100.0	0.0
27	SULAWESI SELATAN	22	19	3	86.4	13.6
28	SULAWESI TENGGARA	46	39	7	84.8	15.2
29	GORONTALO	29	19	10	65.5	34.5
30	SULAWESI BARAT	30	27	3	90.0	10.0
31	MALUKU	29	25	4	86.2	13.8
32	MALUKU UTARA	24	21	3	87.5	12.5
33	PAPUA	14	11	3	78.6	21.4
34	PAPUA BARAT	10	9	1	90.0	10.0
	TOTAL	807	671	136	83.1	16.9

TANTANGAN PEREMPUAN MENUJU PEMILU 2019

Waktu penyelenggaraan pemilu yang serentak (5 kotak) memiliki tantangan tersendiri yakni:

- Memungkinkan terjadi penurunan partisipasi yang disebabkan oleh kejenuhan terhadap rentetan Pemilu (Pemilu 2014, Pemilu 2015, Pemilu 2017, & Pemilu 2018)
- Invalid votes (suara tidak sah) yang dilatarbelakangi oleh kebingungan pemilih mengingat:
 - Pemilih akan mendapat lima surat suara sekaligus;
 - Surat Suara DPR dan DPRD hanya mencantumkan logo partai, nomor urut, dan nama calon anggota legislatif.
 - Adanya fakta banyaknya surat suara tidak sah di Pilkada yang padahal disain surat suaranya lebih mudah untuk dipahami.

TREND PARTISIPASI KEHADIRAN PEMILIH KE TPS



Pemilu Legislatif 2014

Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014

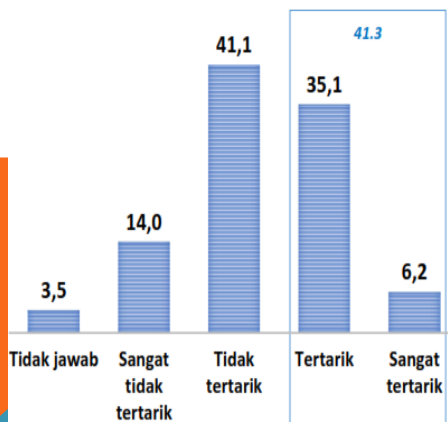
Pilkada 2015

Pilkada 2017

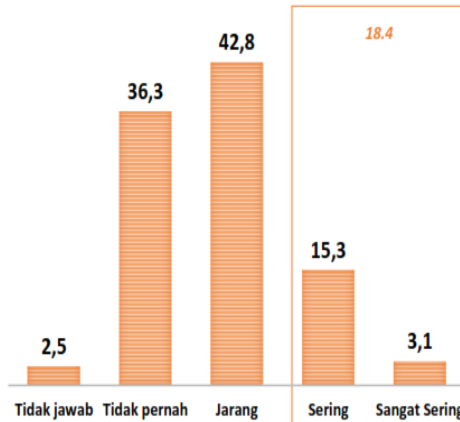
Pilkada 2018

Ketertarikan terhadap Politik dan Intensitas Diskusi Politik

Seberapa tertarik Anda untuk mengikuti berita politik atau pemerintahan?

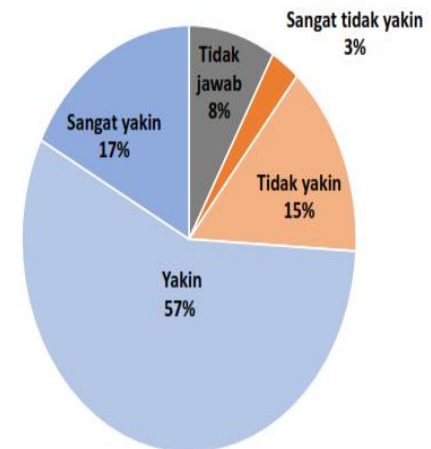


Seberapa sering Anda membicarakan masalah politik atau pemerintahan dengan orang lain, termasuk keluarga, teman atau tetangga?



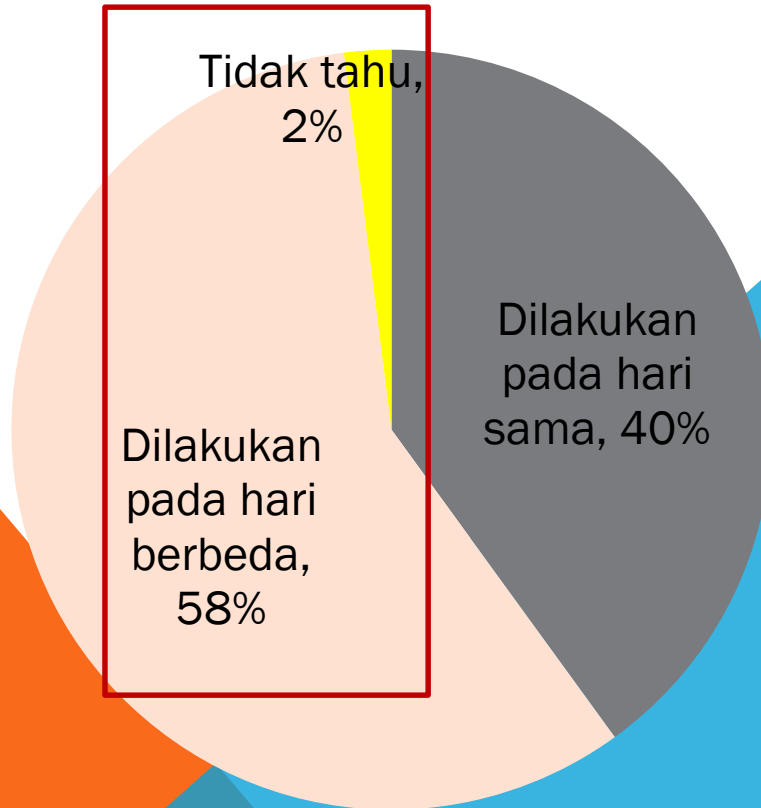
Efikasi Politik

Seberapa Anda yakin bahwa partisipasi pemilih seperti Anda dalam pemilu ikut menentukan terpilihnya pemimpin yang baik?



Hasil Survei Polling Center & Perludem di Tahun 2017

Base : Semua responden (n : 400)



60% pemilih belum mengetahui bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD akan dilakukan di waktu yang sama pada tahun 2019

*Menurut pemahaman Anda, apakah Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif (DPR/DPRD/DPD) akan dilakukan pada waktu yang sama atau berbeda pada **Pemilu 2019**?*

PILKADA 2018

Provinsi	Jumlah Seluruh Suara Sah	Jumlah Suara tidak Sah	Persentase Surat Suara Tidak Sah	Jumlah seluruh Suara Sah dan Tidak Sah
KALIMANTAN BARAT	2,588,541	54,933	2%	2,643,474
JAWA TENGAH	17,630,687	778,805	4%	18,409,492
NUSA TENGGARA BARAT	2,553,602	84,361	3%	2,637,963
BALI	2,103,005	43,088	2%	2,146,093
RIAU	2,092,526	53,606	2%	2,146,132
LAMPUNG	4,099,272	80,133	2%	4,179,405
SULAWESI TENGGARA	1,135,179	22,212	2%	1,157,391
SULAWESI SELATAN	4,256,439	77,920	2%	4,334,359
KALIMANTAN TIMUR	1,333,090	50,110	4%	1,383,200
JAWA TIMUR	19,541,232	782,027	4%	20,323,259
SUMATERA SELATAN	3,877,626	133,072	3%	4,010,698
JAWA BARAT	21,979,995	744,338	3%	22,724,333
MALUKU	805,654	8,384	1%	814,038
MALUKU UTARA	554,734	7,976	1%	562,710
NUSA TENGGARA TIMUR	2,354,856	47,550	2%	2,402,406
SUMATERA UTARA	5,716,097	90,770	2%	5,806,867
PAPUA	2,871,547	38,954	1%	2,910,501
JUMLAH	95,494,082	3,098,239	3%	98,592,321

Sumber: Evaluasi Pilkada 2018 untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 12 Juli 2018

LEMAHNYA DUKUNGAN FINANSIAL UNTUK PEREMPUAN

- **PP Nomor 1 Tahun 2018** peningkatan bantuan keuangan partai politik dari negara dengan rincian Rp. 1000 untuk tingkat pusat, Rp. 1200 untuk tingkat provinsi, dan Rp. 1500 untuk tingkat kabupaten/kota.
- **Pasal 9:**
 - (1) Bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk oprasional sekretariat partai politik.
- Seharusnya ada ketentuan “30% bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk peningkatan keterwakilan perempuan”.
- Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU 7/2017 menyebutkan penyebaran bahan kampanye, iklan media massa cetak/elektronik, dan internet, debat pasangan calon dapat didanai oleh APBN.
- Beberapa item kampanye yang didanai oleh negara seharusnya bisa diperentukan juga untuk memfasilitasi kampanye perempuan. Misalnya, membuat iklan/baliho khusus caleg perempuan.

REKOMENDASI

1. Model rekrutmen diinternal partai politik yang membuka ruang partisipasi perempuan dengan menempatkan perempuan kedalam tim seleksi caleg;
 2. Mendorong kebijakan diinternal partai politik untuk menempatkan perempuan di nomor urut 1 di 30% daerah pemilihan;
 3. Adanya dukungan pendanaan negara yang dikhususkan untuk pemberdayaan caleg perempuan;
 4. Perempuan perlu mendorong isu-isu spesifik yang lekat kaitanya dengan persoalan perempuan itu sendiri;
 5. Peningkatan kampanye “He for she” dan “Perempuan pilih perempuan”.
- 